

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mochamad Syawie

ABSTRAK

Dalam teori ekonomi terdapat model pertumbuhan yang memprediksikan perubahan ekonomi atas dasar variable-variabel ekonomi seperti tingkat tabungan dan investasi, penawaran tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, dan perdagangan atau ekspor.

Pertumbuhan ekonomi adalah hasil atau akibat dari perubahan-perubahan formasi permodalan, input tenaga kerja, dan berbagai unsur lain yang menyangkut perubahan produktifitas. Bila konsep pertumbuhan ekonomi dipandang dari sudut yang lebih luas, faktor-faktor lainnya akan terangkum seperti variable-variabel sosial yang mengukur struktur industri, perubahan populasi dan kesempatan pendidikan.

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui pendekatan teoritis-konseptual maupun yuridis-kontekstual. Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial berakar pada pembangunan sosial dan berpusat pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literatur mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Oleh karena itu, di Indonesia pembangunan kesejahteraan sosial memiliki akar baik secara teoritis-konseptual, yaitu pembangunan sosial berpusat pada rakyat, maupun yuridis-kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Politik ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mendapat ujian cukup serius pada saat ini ketika pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil, tetapi kesejahteraan untuk rakyat bawah dipertanyakan.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

In economic theory there is a growth model that predicts changes in the economy based on economic variables such as levels of savings and investment, labor supply, advances in production technology, and trade or export. Economic growth is the result or consequence of changes in capital formation, labor input, and various other elements relating to changes in productivity. If the concept of economic growth is seen from a wider angle, other factors will be summed up as social variables that measure the industrial structure, changes in population (people) and educational opportunities. Development of social welfare can be understood through theoretical-conceptual approach and the juridical-contextual. Conceptually development of social welfare based on social development and centered in people. In the context of national development, social welfare development is an integral part of people's welfare. Welfare development in harmony with the conception of social development, which

in the literature include the development in health, education and housing. Therefore, social welfare development in Indonesia has its roots both theoretical-conceptual, which is social development centered on people, as well as juridical and contextual development of welfare. Political economy for the welfare of people got pretty serious examination at the moment when economic growth was considered successful, but welfare for the people under questionable.

Key words: economic growth and people welfare

I. PENDAHULUAN

Menarik untuk disimak Diskusi Panel Akhir Tahun Ahli Ekonomi Kompas bertema "Evaluasi 2010 dan Proyeksi 2011: Akankah Kita Mampu Berlari Lebih Cepat?" (Kompas, 24/12/2010). Optimistis, tetapi harus berhati-hati (cautiously optimistic). Demikian konsesus panelis dalam Diskusi Panel Akhrit Tahun Ahli Ekonomi Kompas tentang prospek ekonomi 2011.

Meski pertumbuhan ekonomi 2010 diperkirakan 5,9 persen (lebih tinggi dari tahun lalu), ada banyak gugatan dilontarkan para panelis. *Pertama*, pertumbuhan yang dicapai masih jauh di bawah tingkat pertumbuhan potensial. Dibandingkan negara ASEAN dan Vietnam, pertumbuhan kita juga paling lambat. *Kedua*, pertumbuhan sebesar itu tak cukup untuk bisa menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru dan penganggur yang ada. *Ketiga*, pertumbuhan rendah ini masih dibarengi memburuknya kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Ini tercermin, antara lain, dari menurunnya jumlah tenaga kerja yang diserap untuk setiap persen pertumbuhan dan hancurnya kualitas lingkungan. *Keempat*, pertumbuhan cenderung inklusif karena manfaat pertumbuhan tidak dirasakan secara merata oleh berbagai kelompok masyarakat, ditandai kesenjangan pendapatan yang kian lebar. Kita menyaksikan munculnya orang-orang sangat kaya karena akses eksklusif

kepemilikan dan penguasaan asset sumber daya alam (SDA) sementara kelompok paling miskin dan rentan dikorbankan dalam berbagai kebijakan penyesuaian ekonomi, yang antara lain terjadi karena kegagalan kebijakan.

Menurut informasi Puslit Ekonomi UPI, 2 persen penduduk terkaya menguasai 46 persen asset nasional, sedangkan 98 persen penduduk menguasai 54 persen asset nasional. Itu berarti, kesenjangan kaya-miskin cukup lebar (Sayidiman Suryohadiprojo; 2011). Menurut data dari berbagai pihak, reformasi bukan mengurangi kesenjangan itu, malah sebaliknya. Ekonomi Indonesia lebih diarahkan ke sistem ekonomi neoliberal sehingga kurang perhatian kepada perbaikan distribusi penghasilan.

Oleh karena itu, salah satu tantangan 2011 adalah keluar dari perangkap pertumbuhan rendah dan pindah ke gigi lebih tinggi (*shifting into higher gear*). Juga bagaimana pembangunan langsung mengena jantung persoalan ekonomi, terutama pengangguran dan kemiskinan, kunci peningkatan kesejahteraan. Di atas kertas, banyak faktor yang mendukung bisa dicapainya pertumbuhan lebih tinggi 2011.

Dilihat dari siklus ekonomi, kita juga berada pada periode ekspansi yang diperkirakan akan berlanjut hingga 2016. Resiko berlanjutnya resesi (*double-diprecession*) ekonomi dunia juga berkurang meski AS belum bergerak dan

UE terpuruk ke dalam krisis utang. Secara geografis, kita berada di tengah kawasan dengan pertumbuhan terpesat di dunia. UNCTAD menempatkan Indonesia di urutan kesembilan tujuan investasi paling menarik, mengalahkan Thailand dan Malaysia, antara lain karena pertumbuhan jumlah dan daya beli penduduk strata pendapatan menengah yang pesat (Kompas, 24/12/2010).

Terkait dengan pertumbuhan cepat, menarik apa yang dikemukakan oleh Mancur Olson (1991) bahwa banyak para penulis- beberapa diantaranya para sarjana yang mempunyai reputasi- secara implisit berasumsi atau secara eksplisit menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong ke arah stabilitas politik dan bahkan mungkin ke arah kehidupan demokrasi damai. Mereka juga telah menegaskan bahwa "pembangunan ekonomi adalah salah satu kunci untuk stabilitas dan perdamaian dunia".

II. PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam teori ekonomi terdapat model pertumbuhan yang memprediksikan perubahan ekonomi atas dasar variable-variabel ekonomi seperti tingkat tabungan dan investasi, penawaran tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, dan perdagangan atau ekspor.

Pertumbuhan ekonomi adalah hasil atau akibat dari perubahan-perubahan formasi permodalan, input tenaga kerja, dan berbagai unsur lain yang menyangkut perubahan produktifitas. Bila konsep pertumbuhan ekonomi dipandang dari sudut yang lebih luas, factor-faktor lainnya akan terangkum seperti variable-variabel sosial yang mengukur struktur industri, perubahan populasi (penduduk) dan kesempatan pendidikan.

Mengutip pandangan Lane dan Ersson (1994) bahwa terdapat beberapa variable yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan, antara lain:

1. Variabel Ekonomi

Peningkatan investasi secara tajam cenderung ditemui di negara yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat terutama di Negara-negara Dunia Ketiga. Penemuan tersebut bisa ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa proses pertumbuhan ekonomi senantiasa disertai oleh, atau didahului lonjakan investasi. Kenaikan ekspor juga sering menandai proses pertumbuhan ekonomi. Tingkat dan kemajuan investasi merupakan variable kunci dalam setiap model ekonomi mumi, dan sesuai dengan bukti empiris, pengaruhnya memang cukup besar.

2. Variabel Sosial

Faktor-faktor sosial juga relevan atas bervariasinya tingkat pertumbuhan di beberapa negara. Mengingat perbedaan lingkungan atau konteks sosial member implikasi yang berlainan terhadap parameter-parameter dasar yang menentukan pertumbuhan ekonomi, seperti investasi modal, input tenaga kerja dan teknologi.

Beralihnya sebagian angkatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri cenderung dapat memperbesar produktifitas. Meningkatkan kualitas pendidikan akan memacu pertumbuhan ekonomi karena pendidikan memperbaiki kualitas angkatan kerja.

3. Variabel Politik

Sejak lama telah diperdebatkan positif-negatifnya dampak demokrasi terhadap

pertumbuhan ekonomi. Sebuah rezim otoriter cenderung tidak bisa dipungkiri memang berpeluang mempromosikan pertumbuhan ekonomi karena ia memiliki kapasitas untuk memobilisir sumber daya sebanyak mungkin untuk keperluan investasi. Ada pula hipotesis politik yang menyatakan bahwa sektor publik (pemerintah) yang besar mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan ini, terdapat dua mekanisme yang menyatakan bahwa faktor-faktor politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang diberlakukan pemerintah pada berbagai periode. Ia bisa memperbesar, dan mungkin bisa pula memperkecil laju pertumbuhan. *Kedua*, faktor politik membentuk iklim politik yang mewarnai faktor-faktor ekonomi penentu pertumbuhan (Lane dan Ersson; 1994).

III. DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN

Sebagaimana ditulis di bagian atas, bahwa sejak lama telah diperdebatkan positif-negatifnya dampak demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi perdebatan yang panjang di kalangan sarjana ilmu politik dan ekonomi antara kaitan demokrasi dengan kesejahteraan. Perdebatan berpangkal pada pertanyaan apakah demokrasi dapat mengantarkan ke kesejahteraan? Kesimpulan perdebatan tetap spekulatif-hipotetikal karena tergantung pada asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linier-kausalistik, melainkan nonlinier kondisional yang melibatkan banyak faktor,

seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakkan hukum, kemantapan /kelenturan institusi politik (Alhumami, 2007). Jika prasyarat fundamental tidak terpenuhi, demokrasi akan menyebabkan stagnasi ekonomi, bahkan bisa berubah menjadi katastrofi sosial. Inilah yang sekarang dialami negara-negara yang berada dalam masa transisi menuju konsolidasi demokrasi (Afrika dan Amerika Latin). Berbagai studi menunjukkan, sekitar 80 persen negara-negara berkembang sedang dalam periode transisi untuk memantapkan demokrasi.

Argumen klasik yang diusung SM Lipset, sebagaimana dikutip Amich Alhumami (2007) pun kembali bergema, demokrasi hanya bisa berkembang baik bila ditopang oleh warga-negara berpendidikan memadai serta kelas menengah kuat dan independen. Keseluruhan argumentasi SM Lipset bertolak dari tesis berikut: "Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mungkin iayakin dalam nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi".

Di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah, organisasi sosial masyarakat sipil tak berfungsi, maka demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunistis, yang menawarkan janji-janji populis agar bisa dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat pemerintahan. Namun, setelah terpilih mereka hanya peduli dengan kepentingan sendiri memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi lalu melenggang meninggalkan rakyat berkubang dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

IV. PEMBANGUNAN SOSIAL

Pembangunan sosial adalah pembangunan masyarakat yang tujuannya tidak hanya untuk masyarakat itu sendiri akan tetapi bagaimana masyarakat dapat membangun atau mengembangkan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, nilai-nilai dan aspirasinya. Tujuan mendasar pembangunan sosial adalah meningkatkan atau memajukan kesejahteraan sosial (Justika S. Baharsyah; 1999). Ada empat nilai dasar pembangunan sosial yang saat ini diterima secara luas yaitu partisipasi, keberlanjutan, integrasi sosial, dan hak azasi manusia. Keempat nilai dasar tersebut merupakan basis normatif dalam pembangunan sosial, yang memberikan pengertian pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan yang relevan bagi semua bangsa, budaya dan situasi. Juga merupakan nilai-nilai yang saling berhubungan interkatif dan saling menguatkan.

Munculnya pembangunan sosial sebagai paradigma pembangunan yang semakin populer dan diterima bangsa-bangsa, terbukti dengan diadakannya berbagai konferensi pembangunan sosial. Salah satu momentum penting adalah diselenggarakannya World Summit on Social Development tahun 1995 di Kopenhagen, Denmark, yang diprakarsai oleh PBB. Sehubungan dengan ini Midgley, sebagaimana dikutip Justika Baharsyah (1999) menyatakan bahwa peristiwa ini telah mengangkat lagi pembangunan sosial sebagai topik yang penting untuk diskusi internasional setelah sebelumnya diabaikan. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan sosial merupakan suatu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan saja mengangkat kualitas hidup semua warga masyarakat, tetapi juga member solusi terhadap masalah-masalah sebagai akibat pembangunan yang terdistorsi.

Dengan cara ini maka situasi ketertindasan yang menjadi gejala di banyak Negara dewasa ini dapat dipecahkan dengan pendekatan yang memadukan tujuan ekonomi dan tujuan social.

Perspektif pembangunan sosial mencakup kondisi masyarakat secara komprehensif dengan fokus masyarakat. Ia juga merupakan intervensi yang direncanakan, mendukung pendekatan universalistik dan keharmonisan antara intervensi sosial dengan pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan sosial merupakan pendekatan terpadu antara tujuan ekonomi dengan tujuan sosial, yang merupakan upaya aktif memadukan pembangunan ekonomi dan sosial.

V. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui pendekatan teoritis-konseptual maupun yuridis-kontekstual. Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial berakar pada pembangunan sosial dan berpusatkan pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat selaras dengan konsepsi pembangunan sosial, yang dalam literatur mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan (Hardiman dan Midgley; 1982, dalam Justika Baharsyah; 1999). Oleh karena itu, di Indonesia pembangunan kesejahteraan sosial memiliki akar baik secara teoritis-konseptual, yaitu pembangunan sosial berpusatkan pada rakyat, maupun yuridis-kontekstual yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sepintas telah disinggung bahwa sejak tahun 1980-an, setelah banyak negara berkembang mengalami distorsi pembangunan, maka pembangunan sosial mulai mendapat prioritas. Padahal sebelum itu, pemecahan sosial umumnya dilakukan melalui mekanisme pasar sebagaimana ciri negara-negara kapitalis. Pada hakekatnya tidak pernah ditemukan konsep pembangunan kesejahteraan sosial karena secara intemasional ia bukanlah sektor atau subsektor dari pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial adalah tujuan dan kondisi sebagai "buah" pembangunan. Tidak heran, jika kemudian kesejahteraan sosial menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa (Justika Baharsyah; 1999). Di Indonesia, istilah pembangunan kesejahteraan sosial lahir sebagai dampak dari kebijakan penempatan kesejahteraan sosial sebagai sebuah subsektor dari sektor kesejahteraan rakyat. Sebagai subsektor, pembangunan kesejahteraan sosial lebih bereperan menangani masalah-masalah marjinal dan residual.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Perspektif pembangunan sosial mencakup kondisi masyarakat secara komprehensif dengan fokus masyarakat. Ia juga merupakan intervensi yang direncanakan, mendukung pendekatan universal dan keharmonisan antara intervensi sosial dengan pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan sosial merupakan pendekatan terpadu antara tujuan ekonomi dengan tujuan sosial, yang merupakan upaya

aktif memadukan pembangunan ekonomi dan sosial sebagai bagian integral.

VI. PENUTUP

Berbagai kalangan, terutama pemerintah dan organ-organnya, pada pengujung tahun lalu, menatap tahun 2011 dengan cerah dan optimistis. Begitulah prediksi atau analisisnya. Terutama menyangkut perekonomian. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berlanjut, bahkan bisa mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010.

Sejatinya, pertumbuhan ekonomi bukanlah semata-mata soal peningkatan angka total output perekonomian nasional. Jauh lebih substansial adalah bagaimana tingkat pengangguran bisa ditekan secara signifikan dan kemiskinan diturunkan secara dramatis (Andi Seruji; 2011). Pengangguran dan kemiskinan pasti ada di manapun. Di Indonesia, secara kuantitatif bisa jadi pengangguran dan kemiskinan terus menurun, sesuai dengan versi pemerintah. Akan tetapi, ketika kita lebih cermat mengamati sekeliling mungkin ceritera di kepala kita mengatakan lain.

Di setiap sudut jalan, misalnya, sangat mudah kita temukan orang-orang usia produktif bergerombol bersama sepeda motor mereka. Mereka itu adalah para tukang ojek. Ya, ngojek itulah pekerjaan yang paling mudah dimasuki setiap orang untuk mendapatkan uang. Jika sekiranya ada lapangan pekerjaan yang lebih baik, tentu mereka tidak memilih ngojek dengan hasil yang tidak seberapa dan tidak menentu pula. Kemiskinanlah yang cenderung menyeret mereka ke sudut-sudut jalan kota-kota besar itu.

Di pedesaan, yang berbasis pertanian, ceriteranya lain lagi. Masyarakat menghadapi kenyataan sulitnya mencari nafkah untuk hidup sehari-hari. Masyarakat terimpit beban hidup yang cukup berat karena daya beli mereka tertekan pada titik terendah.

Menarik juga untuk dikutip pendapat Saifur Rohman (2011), peneliti filsafat, yang menyatakan bahwa modus-modus pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak meningkatkan kesejahteraan sosial. Tak aneh jika publik melihat kesejahteraan social selama setahun terakhir cenderung ternerosot. Jika triwulan 1-2010 kesejahteraan dipersepsikan pada angka 45 persen, pada akhir tahun telah merosot di bawah angka 35 persen. Data ini tentu saja berkebalikan dengan proyeksi yang telah dibuat oleh tim ekonomi Indonesia.

Ideanya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Kenyataannya, meski pemerintah mengklaim keberhasilannya menjaga pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tadi, tukang ojek, pedagang keliling, dan pengemis justru semakin bejubel. Karena itulah, kabinet dan politisi, kiranya berpolitik untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat sekeras-kerasnya.

Senada dengan ini, Rachbini menyatakan bahwa ada kontradiksi di dalam wacana kinerja dan kebijakan ekonomi, yakni klaim kinerja ekonomi yang "kinclong" oleh pemerintah pada satu sisi dan masalah kemiskinan serta sektor informal yang masih luas dan buruk pada sisi lain. Politik ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mendapat ujian yang cukup serius pada saat ini ketika pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil,

tetapi kesejahteraan untuk rakyat bawah dipertanyakan.

Jadi, kita tengah berhadapan dengan sistem ekonomi dengan dua wajah. Satu sisi wajah modern yang tumbuh dan berkembang karena dan dengan pasar. Peranan pemerintah yang kreatif tidak diperlukan di sisni karena pasar sebagai tatanan spontan (*spontaneous order*) sudah bekerja dengan sendirinya. Semua Negara di sekitar China dan India mengalami pertumbuhan yang cepat termasuk cadangan devisa yang mengalir ke dalam.

Tetapi pada sisi lain system ekonomi kita tetap memperlihatkan wajah suram sector informal, sector yang dianggap penyelamat, tapi kurang produktif. Jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dari sekitar 65 juta menjadi 75 juta orang. Dalam keadaan tidak krisis pun sector informal tetap menjadi katup pengaman dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja di sector formal yang prduktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amich Alhumani, 2007. Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan, dalam *Kompas*, tanggal 27 Desember.
- Andi Seruji, 2011. "Kolom Ekonomi Politik Orang Miskin," dalam *Kompas*, tanggal 29 Januari.
- Didik Rachbini, 2010, Kemiskinan dan Politik Ekonomi, dalam *Media Indonesia*, tanggal 12 Januari.
- Justika S. Baharsyah, 1999. *Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial Pelajaran Dari*

- Krisis*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Lipset SM, 1991. "Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi," dalam *Arus Pemikiran Ekonomi Politik* (Amir Effendi, Ed), 1991. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mancur Olson. Jr, 1991. "Pertumbuhan Cepat Sebagai Kekuatan Destabilisasi", dalam *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, Amir Effendi Siregar, Ed, 1991. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jan-Eric Lane dan Svante Ersson, 1994. *Ekonomi Politik Komparatif*, Jakarta: Raja Grafindo Prasad.
- Saifur Rohman, 2011. Memaknai Ekonomi Tiwul, dalam *Kompas*, tanggal 8 Januari.
- Sayidiman Suryohadiprojo, 2011. Kesenjangan adalah Kerawanan, dalam *Kompas*, tanggal 8 Januari.

BIODATA PENULIS

Mochamad Syawie, Alumnus Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Program Studi Sosiologi, Dasen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Dan Peneliti pada Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Jakarta